RENCANA STRATEGIS

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2021 – 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2021

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 istematika Penulisan 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 5
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kediri 5
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kabupaten Kediri 13
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri 15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri 21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 23
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 24
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 33
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 35
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 36
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 37
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri 37
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 39
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 41
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 59
BAB VIII PENUTUP 61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dokumen Renstra Perangkat Daerah digunakan sebagai dokumen perencanaan bagi perangkat daerah untuk menyusun rencana kerja perangkat daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Kediri menyusun RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2022 - 2026. RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2022 – 2026 tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 - 2026. Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Bagan 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Selanjutnya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINAS P2KBP3A) Kabupaten Kediri Tahun 2021 - 2026 berlandaskan pada:

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
h. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
k. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
o. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
p. Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur;
q. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2011–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 1);

r. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13);
s. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 43);
t. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 - 2026;
u. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kediri;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunganan Anak Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026 disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Dinas P2KBP3A sebagai organisasi perangkat daerah di bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan maksud sebagai berikut :

a. Menjabarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026;
b. Sebagai pedoman dalam menentukan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah serta menjamin pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kediri;
c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dan penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
d. Mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, antar tingkat pemerintahan dan partisipasi masyarakat;

Rencana Strategis Dinas P2KBP3A Kabupaten Kediri 2021-2026 disusun dengan tujuan:

a. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Daerah (RKPD) dan sebagai indikator evaluasi kinerja Perangkat Daerah selama periode 2021-2026;
b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
c. Menjamin keterkaitan serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengendalian;

d. Menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan yang inklusi untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah DINAS P2KBP3A Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika, sebagi berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kediri
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kabupaten Kediri
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri, maka Pemerintah Kabupaten Kediri membentuk Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A).

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi dalam struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas :

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak,
b. Penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak,
c. Pelaksanaan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak,
d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak,
e. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak,
f. Pembinaan penyelenggaraan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak,
g. Pelaksanaan administrasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak, dan

h. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik.

B. Sekretaris, mempunyai tugas :

Membantu kepala dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang; membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris menyelenggarakan fungsi **:**

a). Penyusunan rancangan kebijakan dinas,
b). Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang,
c). Penyusunan program dan pelaporan, pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas,
d). Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan,
e). Pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak,
f). Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan,
g). Pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja,
h). Pengkoordinasian penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) kegiatan dinas,
i). Penyusunan profil dinas, dan
j). Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas.

Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan serta Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, dengan tugas sebagai berikut :

1. **Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

2. **Kepala Sub Bagian Keuangan** mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.
3. **Kepala Sub Bagian Penyusunan Program** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran.

C. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, mempunyai tugas **:**

Melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengendalian penduduk. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi :

a) Pengoordinasian rencana dan program kerja Bidang Pengendalian Penduduk;
b) Pemverifikasian petunjuk teknis di bidang pengendalian penduduk;
c) Pengoordinasian pedoman pencatatan, pelaporan dan analisis kegiatan pengendalian penduduk;
d) Pengoordinasian pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
e) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengendalian penduduk;
f) Pengoordinasian kerjasama pengendalian penduduk dengan lintas sektor;
g) Pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengendalian penduduk; dan
h) Pemverifikasian data dan informasi kependudukan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dibantu oleh Kepala Seksi Perencanaan Pengendalian Penduduk dan Kepala Seksi Informasi Kependudukan dan Keluarga, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. **Kepala Seksi Perencanaan Pengendalian Penduduk** mempunyai tugas melakukan analisis data kependudukan, perencanaan pengendalian penduduk, dan kerjasama bidang kependudukan.

3. **Kepala Seksi Informasi Kependudukan dan Keluarga** mempunyai tugas melakukan tata kelola sistem informasi kependudukan dan keluarga.

D. Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana, mempunyai tugas melaksanakan, mengelola dan mengendalikan Program Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana, Advokasi dan Kesehatan Reproduksi Remaja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

a) Pengoordinasian penyusunan program kegiatan, kebijaksanaan operasional, penganggaran serta pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan, pembinaan Keluarga Berencana (KB), advokasi dan kesehatan reproduksi remaja;
b) Pemverifikasian penyusunan pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam kebijakan operasional pelayanan dan pembinaan KB**,** advokasi dan kesehatan reproduksi remaja;
c) Pemverifikasian penyusunan pedoman advokasi, penerangan dan motivasi kegiatan pelayanan, pembinaan KB, peningkatan partisipasi pria, serta pendewasaan usia perkawinan;
d) Pengoordinasian pengembangan jaringan pelayanan KB, advokasi, pelayanan kesehatan reproduksi remaja, termasuk pelayanan KB di rumah sakit dan perusahaan;
e) Pengoordinasian kegiatan di bidang pelayanan dan pembinaan KB serta pendewasaan usia perkawinan dengan instansi terkait, Lembaga Sosial dan Organisasi Masyarakat (LSOM) serta Organisasi Wanita; dan
f) Pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana;

Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana dibantu oleh Kepala Seksi Kesertaan ber-KB dan Jaminan Ketersediaan Alkon serta Kepala Seksi Advokasi dan Kesehatan Reproduksi Remaja, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. **Kepala Seksi Kesertaan ber-KB dan Jaminan Ketersediaan Alat Kontrasepsi** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan, pembinaan dan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi.
2. **Kepala Seksi Advokasi dan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)** mempunyai tugas melakukan kegiatan Advokasi, KIE (Komunikasi Informasi Edukasi), penerangan dan motivasi program Kependudukan, Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan Kesehatan Reproduksi Remaja.

E. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan, mengelola, mengendalikan ketahanan dan pemberdayaan keluarga serta peningkatan peran serta masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi :

a). Pemverifikasian rencana program kegiatan dan kebijaksanaan operasional ketahanan dan pemberdayaan keluarga, serta penggerakan lini lapangan;

b) Pengoordinasian anggaran operasional kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, serta penggerakan lini lapangan;

c). Pengoordinasian pedoman petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam kebijakan operasional kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, serta penggerakan lini lapangan;

d). Pengoordinasian pedoman pencatatan, pelaporan dan analisis kegiatan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga, serta panggerakan lini lapangan;

e). Pemverifikasian sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL);

f). Pengoordinasian petunjuk pembinaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);

g). Pengoordinasian petunjuk pembinaan pemberdayaan keluarga serta penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas;

h). Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dengan institusi terkait Lembaga Swadaya dan Organisasi Masyarakat (LSOM) di bidang Keluarga Sejahtera;

i). Pemimpinan monitoring evaluasi dan melaporkan hasil kegiatan ketahanan keluarga, pemberdayaan masyarakat dan penggerakan lini lapangan;

Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dibantu oleh Kepala Seksi Ketahanan Keluarga serta Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Penggerakan Lini Lapangan, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. **Kepala Seksi Ketahanan Keluarga** mempunyai tugas melakukan peningkatan keluarga sejahtera dan ketahanan keluarga
2. **Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Penggerakan Lini Lapangan** mempunyai tugas melakukan kegiatan pemberdayaan keluarga dan peningkatan penggerakan dan pembinaan lini lapangan.

F. Bidang Pemberdayaan Perempuan Serta Perlindungan Perempuan dan Anak (PP dan PPA) mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pemberda]yaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi :

a) Pemverifikasian, pengoordinasian rencana dan pelaksanaan program/kegiatan bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak ;

b) Pengoordinasian dan pemfasilitasian program/kegiatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, pengarustamaan gender dan perlindungan serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak;
c) Pengoordinasian, pengembangan, dan penguatan kelembagaan/jaringan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d) Pengoordinasian dan pengadvokasian penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) atas kebijakan program/kegiatan dinas;
e) Pengoordinasian bahan penyediaan data terpilah gender;
f) Pengoordinasian bahan pengembangan materi Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta perlindungan perempuan dan anak;
g) Pengoordinasian bahan fasilitasi ketersediaan data kekerasan perempuan dan anak
h) Pengoordinasian pembentukan organisasi anak;
i) Pengoordinasian bahan pembuatan komitmen Kabupaten Layak Anak (KLA);
j) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Perempuan dan Anak dibantu oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak.

1. **Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan** mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi Pemberdayaan perempuan.
2. **Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak** mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan pada Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak.

G. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan fungsi yang memerlukan keahlian dan keterampilan secara profesional.

2.1.2 Struktur Organisasi

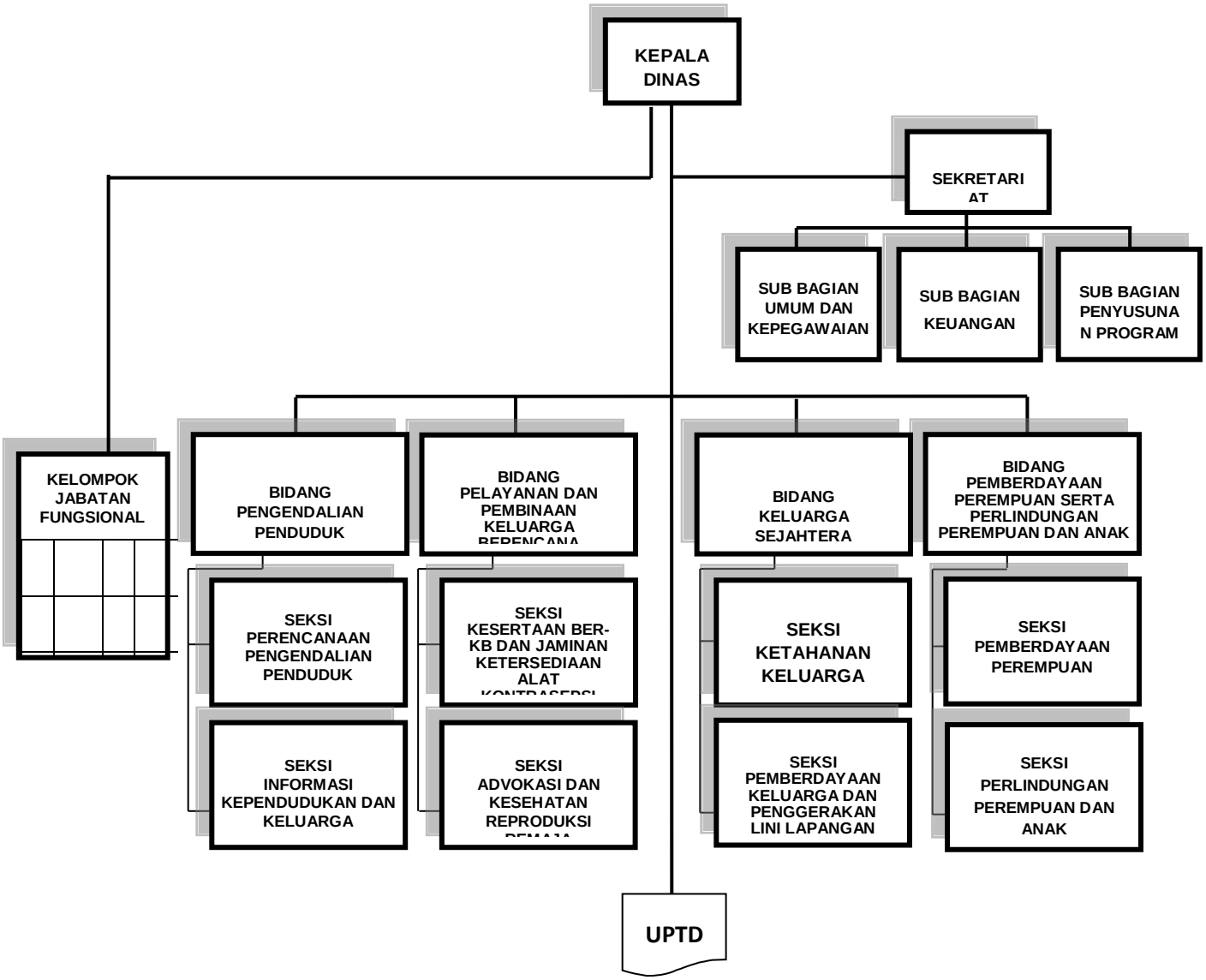
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri dipimpin oleh seorang Kepala

Badan dengan dibantu oleh seorang Sekretaris, empat Kepala Bidang dan kelompok Pejabat Fungsional seperti dapat dilihat pada Bagan 1.

Struktur organisasi tersebut telah sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Bagan 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri



2.2 Sumber Daya PD

2.2.1 Personel

Jumlah seluruh personel Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri per 30 September 2021 sebanyak 24 orang dengan rincian seperti dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2.2
Kondisi Pegawai menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pegawai Negeri Sipil	5	16	21
2	Calon Pegawai Negeri Sipil	0	0	0
3	Honorer	3	0	3
	Jumlah	**8**	**16**	**24**

Tabel 2.3
Kondisi Pegawai menurut Kepangkatan dan Jabatan

No	Kepangkatan	Eselon					Jumlah
		II	III	IV	Fungsi-Onal	Staff	
1	Golongan IV	0	5	7	0	0	12
2	Golongan III	0	0	2	0	4	6
3	Golongan II	0	0	0	0	3	3
4	Golongan I	0	0	0	0	0	0
5	Honorer	0	0	0	0	3	3
	Jumlah	**0**	**5**	**9**	**0**	**10**	**24**

Tabel 2.4
Kondisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan dan Jabatan

No	Tingkat Pendidikan	Eselon					Jumlah
		II	III	IV	Fungsi-Onal	Staff	
1	S-2	0	5	8	0	1	14
2	S-1/DIV	0	0	1	0	2	3
3	Sarjana Muda/DIII	0	0	0	0	2	2
4	DI/DII	0	0	0	0	0	0
5	SLTA	0	0	0	0	2	2
6	SLTP	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	**0**	**5**	**9**	**0**	**7**	**21**

Dibandingkan dengan kebutuhan pegawai sesuai dengan struktur organisasi serta analisis jabatan dan beban kerja, jumlah pegawai per 30 September 2016 belum memenuhi kebutuhan seperti terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.5
Perbandingan antara Kebutuhan dan Ketersediaan Pegawai

No	Jenjang Pendidikan	Kebutuhan (orang)	Tersedia	
			Orang	%
1	S-2	17	17	147,05%
2	S-1/DIV	5	3	27,60%
3	Sarjana Muda/DIII	2	2	100%
4	DI/DII	0	0	0
5	SLTA	3	2	90%
6	SLTP	0	0	
	Jumlah	**27**	**24**	**42,92%**

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung program dan kegiatan DP2KBP3A Kabupaten Kediri telah memiliki berbagai sarana dan prasarana meskipun secara keseluruhan belum terpenuhi. Sarana dan Prasarana yang telah dimikili DP2KBP3A Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Tabel Sarana dan Prasarana

No	Nama / Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Sepada Motor	101 unit	
2.	Kendaraan Dinas Roda 4	3 unit	
3.	Mobil Unit Penerangan	1 unit	
4.	Mobil Unit Pelayanan	1 unit	
5.	Mobil Pengangkut Akseptor	1 unit	
6.	Mobil Distribusi Alkon	1 unit	
7.	Balai Penyuluhan	26 gedung	Lokasi di Kecamatan
8.	Public Adress (PA)	22 unit	kecamatan
9.	Personal Komputer	54 buah	kecamatan dan kantor
10.	Laptop	25 buah	Kecamatan dan kantor
11.	Printer	56 buah	kecamatan dan kantor
12.	Sarana Internet	28 jaringan	Kecamatan dari kantor
13.	LCD dan proyektor	32 unit	kecamatan dan kantor

2.3 Kinerja Pelayanan DINAS P2KBP3A Kabupaten Kediri

Pencapaian Kinerja Pelayanan DINAS P2KBP3A Kabupaten Kediri merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan yang dilaksanakan. Dengan memperhatikan capaian indikator kinerja ini akan memudahkan bagi perangkat daerah untuk menentukan sejauh mana target dan realisasi program dan kegiatan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Capaian target indikator kinerja DINAS P2KBP3A Kabupaten Kediri bisa dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	*Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A*				100%	100%	100%	100%	100%	84,76%	100%	100%	100%	100%	84,76	100,00	100,00	100,00	100,00
2	*Prosentase SKPD yang responsip gender*				60%	60%	65%	70%	75%	84,12%	60%	65%	90%	90%	1118,88	100,00	100,00	128,57	120
3	*Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan oleh P2TP2A*				70%	75,%	77%	79%	81%	100%	100%	77%	100%	100%	142,85	125,00	100,00	126,58	123,45
5	*Persentase kelompok perempuan yang aktif dalam pembangunan*				20%	30%	100%	100%	100%	55%	100%	100,00 %	100%	100%	275	100,00	100,00	100,00	100,00
6	*Persentase Kader desa yang aktif*				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	**Persentase Kesertaan KB aktif MKJP**				23,02%	24,13%	24,13%	27,07%	28,53%	72%	34,89	30%	35,43%	36,37%	101,42	144,59	124,33	130,88	127,48
8	***Persentase Unmeet need***				10,90%	*10,80%*	10,75%	10,73%	10,71%		12,27%	10,75%	11,28%	10,56%	130,70	87,39	100,00	95,87	101,40
9	***Persentase pencapaian peserta KB Baru***				90%	*90,00 %*	90,00%	90,00 %	90,00 %		82,89 %	90,00 %	31,89 %	71,06 %	116,17	92,10	100,00	35,43	78,96
10	***Prosentase Perkawinan perempuan usia kurang 20 tahun***				20%	*20%*	19,90%	19,80 %	19,70 %		19,95 %	19,90 %	18,35 %	16,87 %	102,80	100,25	100,00	107,32	114,37
11	***Persentase PUS anggota kelompok BKB, BKR, BKL yang ber-KB***				*BKB 83,99%; BKR 83,21%; BKR 78,72%*	*BKB 84,33%; BKR 83,64%; BKR 79,10%*	BKB 84,50%; BKR 83,86%; BKR 79,86%	BKB 84,66%; BKR 84,07%; BKR 80,24%	BKB 84,83%; BKR 84,29%; BKR 80,62%	*BKB 83,99,53% ; BKR 85,60%; BKR 80,86%*	*BKB 84,53%; BKR 85,02%; BKR 84,81%*	BKB 84,50%; BKR 83,86%; BKR 80,86%	BKB 81,68%; BKR 83%; BKL 74,40%	BKB 81,68%; BKR 83%; BKL 74,40%	*BKB 100,23% ; BKR 101,64% ; BKR 107,21%*	BKB 100%; BKR 100%; BKR 101,25%	BKB 96,28%; BKR 98,72%; BKL 92,72%	BKB 96,28%; BKR98, 46%; BKL 92,28%	*BKB 100,23% ; BKR 101,64% ; BKR 107,21%*
12	***Persentase kelompok BKB, BKR dan BKL yang aktif***				BKB 80%; BKR 74%; BKL 70%	BKB 70%; BKR 50%; BKL 60%	BKB 80%; BKR 50%; BKL 70%	BKB 80%; BKR 50%; BKL 70%	BKB 85%; BKR 55%; BKL 75%	*BKB 96,56%; BKR 99,40 %; BKL 93,50%*	*BKB 99,70%; BKR 98,85 %; BKL 99,11%*	BKB 80%; BKR 50%; BKL 70%	BKB 100%; BKR 99,94%; BKL 93,81%	BKB 37,21%; BKR 34,50%; BKL 30,94%	*BKB 142,42%; BKR 197,7 %; BKL 165,18%*	BKB 100%; BKR 100%; BKL 100%	BKB 125%; BKR 199,88%; BKL134,01%	BKB 43,77%; BKR 62,72%; BKL 41,25%	*BKB 44,59%; BKR 61,31 %; BKL 46,64%*

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian Indikator Kinerja DINAS P2KBP3A sebagai berikut:

1. Persentase Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A

   Bahwa capaian persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani oleh P2TP2A setiap tahunnya dapat terngani dengan baik hal ini dengan ditunjukan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan dapat ditangani oleh.
2. Prosentase SKPD yang responsip gender

   Bahwa capaian persentase SKPD yag responsip gender Kabupaten Kediri Sampai dengan Tahun 2020 mengalami peningkatan dan diharapkan bahwa semua SKPD sudah resposif gender
3. Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diselesaikan oleh *P2TP2A*

   Bahwa capaian persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ynag dapat diselesaikan setiap tahunnya dapat diselesaikan dari kasus tany tengah ditangani oleh P2TP2A Kabupaten Kediri.
4. Persentase kelompok perempuan yang aktif dalam pembangunan

   Capaian persentase kelompok perempuan yang aktif setiap tahunnya dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan setiap tahunnya meningkat.
5. Persentase Kader desa yang aktif

   Bahwa Prosentase capaian persetase kader desa yang aktif dapat dikatakan berhasil sampai tahun 2020 karena aktif dalam membantu program pada Dinas P2KBP3A.
6. Persentase Kesertaan KB aktif MKJP

   Bahwa kesertaan KB aktif MKJP di Kabupaten Kediri dari tahun 2016 hingga 2020 mengalami kenaikan serta telah mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya.
7. Persentase Unmeet need

   Bahwa persentase unmetneed di kabupaten Kediri setiap tahunnya mengalami penurunan dan diakhir tahun 2020 mencapai realisasi 10,56% atau tercapai sebesar 101,40% dari target.
8. Persentase pencapaian peserta KB Baru

   Bahwa Persentase pencapaian peserta KB Baru setiap tahunnya mengalami turun naik dari target yang telah ditetapkan sedang di akhir tahun 2020 hanya tercapai 71,06 atau terealisasai sebesar 78,96% dari target. Hal ini dikarenakan adanya pandemi yang berimbas pada pelayanan KB.

9. Prosentase Perkawinan perempuan usia kurang 20 tahun

   Bahwa Persetase perkawinan perempuan usia kurang dari 20 tahun setiap tahunnya berkurang atau menurun hal ini menandakan bahwa pengetahuan masyarakat untuk tidak menikah di usia dini semakin baik. Realisasai capain di tahun 2020 sebesar 114,37% dari target.

10. Persentase PUS anggota kelompok BKB, BKR, BKL yang ber-KB

    Realisasi Capaian persentase PUS anggota Kelompok BKB, BKR dan BKL yang ber-KB pada tahun 2020 BKB 100,23%, BKR 101,64% dan BKL 107,21% yang artinya telah berhasil melampau target yang telah ditetapkan

11. Persentase kelompok BKB, BKR dan BKL yang aktif

    Realisasi Capaian persentase Kelompok BKB, BKR dan BKL yang aktif pada tahun 2020 BKB 44,59%, BKR 61,31% dan BKL 46,64% yang artinya realisasi capaian masih dibawah target karena tahun 2020 adalah masa pendemi covid-19 sehingga untuk kegiatan pertemuan sangat dibatasi.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pada aspek pendanaan pelayanan DINAS P2KBP3A Kabupaten Kediri, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan DINAS P2KBP3A Kabupaten Kediri melalui pelaksanaan Renstra Periode sebelumnya. Realisasi anggaran DINAS P2KBP3A Kabupaten Kediri tahun 2016 - 2020, disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DINAS P2KBP3A Kabupaten Kediri Tahun 2016 – 2020

No	Program / Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasai Anggaran pasa Tahun ke-					Rasio antara Realisasai dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
I	*Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan anak*	67.000.000	71.500.000	100.000.000	105.000.000	105.000.000	89.950.000	56.600.000	52.145.000	66.438.500	116.566.000	*134,25*	*79,16*	*52,15*	*63,27*	*111,02*	13.360.100	87,97
II	*Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan*	747.555.000	662.555.000	672.555.000	688.550.000	702.555.000	676.169.800	531.486.000	985.018.406	47.414.388	71.180.375	*90,45*	*80,22*	*146,46*	*6,89*	*10,13*	232.500.206	66,83
III	*Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan*	163.670.000	153.670.000	155.000.000	155.000.000	170.245.000	179.365.000	145.975.000	118.800.000	315.505.000	47.199.000	*109,59*	*94,99*	*76,65*	*203,55*	*27,72*	1.851.800	102,50
IV	*Peningkatan Peran Serta Perempuan di Pedesaan*	30.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	45.000.000	14.075.000	10.000.000	907.958.000	548.975.000	*150,00*	*93,83*	*50,00*	*4539,79*	*2744,88*	284.201.600	1515,70
V	*Keluarga Berencana*	250.000.000	1.118.750.000	4.713.650.000	4.713.650.000	4.713.650.000	600.848.259	1.535.752.021	3.431.614.850	6.038.865.761	6.036.812.457	*240,34*	*137,27*	*72,80*	*128,11*	*128,07*	426.838.670	141,32
VI	*Pelayanan Kontrasepsi*	581.800.000	990.000.000	630.995.000	633.500.000	657.750.000	568.189.625	679.344.677	508.623.800	791.604.874	701.884.034	*97,66*	*68,62*	*80,61*	*124,96*	*106,71*	-48.879.598	95,71
VII	*Kesehatan Reproduksi Remaja*	21.500.000	17.500.000	45.000.000	50.000.000	52.000.000	41.100.000	17.500.000	122.775.000	240.300.000	22.872.000	*191,16*	*100,00*	*272,83*	*480,60*	*43,98*	51.709.400	217,72
VIII	*Promosi Kesehatan ibu, Bayi, dan anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat*	6.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000	26.000.000		10.000.000			*433,33*		*100,00*	*0,00*	*0,00*	-2.000.000	0,00
IX	*Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR*	80.000.000	40.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	80.000.000	111.890.000	80.000.000			*100,00*	*279,73*	*160,00*	*0,00*	*0,00*	378.000	107,95
X	*Pembinaan Peran serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri*	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	23.600.000	9.410.000	10.000.000			*236,00*	*94,10*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	-1.398.000	86,02

No	Program / Kegiatan	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasai Anggaran pasa Tahun ke-					Rasio antara Realisasai dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Anggaran	Realisasi
XI	***Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga***	30.000.000	36.500.000	36.500.000	36.500.000	40.000.000	10.000.000	28.001.000	146.892.000	58.969.000	137.464.000	*33,33*	*76,72*	*402,44*	*161,56*	*343,66*	40.365.200	203,54
XII	***Program Pengendalian Penduduk***	-	110.000.000	129.500.000	129.500.000	129.500.000		70.232.000	339.819.750	303.157.500	84.688.000		*63,85*	*262,41*	*234,10*	*65,40*	59.879.450	125,15
XIII	***Program pelayanan admnistrasi perkantoran***	261.102.000	289.200.000	303.000.000	319.000.000	374.000.000	289.830.527	319.786.830	339.980.899	383.478.281	267.978.751	111,0	110,58	112,20	120,21	71,65	10.950.658	105,13
XIV	***Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur***	105.900.000	3.826.900.000	147.000.000	151.000.000	175.300.000	1.628.263.529	109.241.931	142.610.900	172.222.699	92.215.480	1537,55	2,85	97,01	114,05	52,60	-452.309.092	360,82
XV	***Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur***	12.000.000	17.000.000	27.000.000	27.000.000	30.000.000	12.000.000	16.948.000	234.276.250	74.323.000	12.620.000	100,00	99,69	867,69	275,27	42,07	47.433.450	276,94
XVI	***Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan***	14.500.000	24.650.000	35.800.000	37.300.000	46.000.000	41.300.000	22.045.000	13.078.000	70.493.000	4.505.500	284,83	89,43	36,53	188,99	9,79	-1.365.700	121,91
	JUMLAH RENCANA AWAL	2.381.027.000	7.383.225.000	7.086.000.000	7.136.000.000	7.286.000.000	2.720.283.681	1.384.399.438	1.948.056.599	2.094.548.354	1.324.227.765	*114,25*	*18,75*	*27,49*	*29,35*	*18,17*	-4.362.147.233	41,58

Tabel 2.6 dan 2.7 menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran DINAS P2KBP3A Kabupaten Kediri selama periode 2016 – 2020 sebagai berikut :

Berdasarkan Realisasi Anggaran Belanja Langsung pada tabel 2.6 tersebut diatas prosentase terbanyak yakni pada Tahun 2016. Yakni 114,25% dari pagu anggaran sejumlah Rp. 2.381.027.000 dan prosentase terendah pada tahun 2020 sebesar 18,17% dari pagu anggaran Rp. 7.286.000.000.

Berdasarkan tabel 2.7 tersebut diatas bahwa realisasi anggaran belanja langsung sampai tahun 2020 mencapai 30,29% dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 31.272.252.000.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DINAS P2KBP3A

Tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pencapaian program dan kegiatan dalam kurun waktu 2011 – 2015 yang menjadi permasalahan

i. Perempuan dan kemiskinan mempunyai dampak sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dalam kondisi kemiskinan perempuan menanggung beban yang lebih berat daripada lali-laki karena kurangnya mendapatkan akses dan manfaat dalam pembangunan.
ii. Kekerasan terhadap perempuan. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang tindak kekerasan terhadap perempuan menyebabkan tingginya prevalensi angka kekerasan terhadap perempuan yang berdampak pada kualitas hidup perempuan dan anak dalam rumah tangga.
iii. Perempuan dan ekonomi. Peluang dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dibidang ekonomi masih dibawah laki-laki. Sebagian besar perempuan bekerja di sektor informal dengan upah yang lebih rendah dibandingkan upah laki-laki dan mengalami perlindungan yang kurang optimal.
iv. Hak Anak masih tingginya hak-hak anak yang belum terlaksana serta tindak kekerasan terhadap anak masih cukup tinggi pula. Untuk pemenuhan hak anak dan mencegah tindak kekerasan terhadap anak perlu adaya fasilitas yang mendukung. Untuk itu Kota Layak anak perlu diwujudkan.
v. Perempuan dan KB. Sampai saat ini Perempuan masih menjadi utama sasaran ber-KB. Prevalensi perempuan ber-KB dibanding dengan laki-laki masih sangat besar. Kesetaraan gender dimana Pria ber-KB sangat diperlukan sehingga pandangan terhadap KB hanya untuk perempuan dapat diubah.
vi. Unmet need yang cukup tinggi akan memberikan peluang terjadinya kelahiran bayi baru yang berdampak pada peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk akan berimbas pada berbagi sektor pembangunan. Pembinaan pada unmet neet ini perlu mendapatkan perhatian

karena memiliki berbagai macam resiko mengingat unmet need ini kebanyakan PUS yang umur istri berlebih dari 35 tahun

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Identifikasi permasalahan merupakan langkah awal dalam penentuan isu-isu strategis perangkat daerah. Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting dalam penyusunan dokumen Renstra, karena analisis isu-isu strategis menjadi dasar utama penentuan prioritas program yang akan dilaksanakan. Isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada 5 (lima) tahun mendatang. Karakteristik isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak untuk ditangani dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan daerah, yang dianalisis dengan berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Strategi yang baik dalam menangani isu strategis sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah yang konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi tersebut juga harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang optimal dalam mewujudkan Rencana Strategis (Renstra).

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DINAS P2KBP3A Kabupaten Kediri

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Lemahnya kelembagaan pengarustamaan gender	Belum optimalnya kinerja pokja PUG	Kurangnya advokasi dan koordinasi pokja PUG
		Masih minimnya pe ran vocal point pada masing-masing OPD	Belum maksimalnya peran tim driver PUG
			Keterlibatan masyarakat dalam pokja PUG masih minim
2	Pencapaian indikator	Kurangnya pemaha man	Cakupan sosialisasi Hak Anak

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	KLA belum optimal	SDM terhadap KLA	masih minim
		Optimalisasi kelembagaan KLA	Koordinasi tim KLA kurang maksimal
			Perlunya peningkatan kemitraan stakeholder (media massa, swasta dan lembaga masyarakat) untuk mewujudkan KLA
			Peran satgas PPA sebagai kepanjangan P2TP2A belum maksimal
3	Tingginya unmetneed	Kurangnya kesadar an PUS untuk ber KB	Minimnya cakupan PUS yang mengikuti sosialisasi tentang KB
		Penerimaan masya rakat terhadap pro gram KB khususnya kontrasepsi mantap belum maksimal (MOW/MOP)	Partisipasi pria dalam pemakaian kontrasepsi MOP masih minim
			Kurangnya SDM penyuluh KB
4	Masih ada wanita kawin usia dibawah 20 tahun	Kurangnya sosialisasi PUP	Cakupan sosialisasi pernikahan dini perlu ditingkatkan
			Kurangnya Genre Kit
5	Pengendalian angka ke lahiran belum optimal	Kurangnya sinkronisasi program KKBPK	Minimnya koordinasi lintas sektoral program KKBPK

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati Kabupaten Kediri periode 2021-2026 adalah "**Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kediri yang maju, berkarakter nasionalis-religius, serta sejahtera berdasarkan ekonomi kerakyatan yang didukung birokrasi yang melayani".**Guna mewujudkan visi tersebut dijabarkan beberapa misi,sebagai berikut:

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius
b. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
c. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah
d. Revitalisasi Pertanian untuk Ketahanan dan Swasembada Pangan
e. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah
f. Optimalisasi Kepariwisataan berbasis Kearifan Lokal
g. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Sumber daya Alam dan Mitigasi Bencana
h. Pengembangan Seni Budaya, Olahraga dan Kreativitas Pemuda
i. Perwujudan Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan pembanguan di Kabupaten Kediri, Bupati Kediri terpilih telah menetapkan prioritas pembagunan tahun 2021 – 2026 yang meliputi :

1. Pembangunan Ekonomi

   Prioritas Nasional : Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

   Prioritas Provinsi : Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata

   Prioritas Kabupaten Kediri : Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Pertanian, UMKM, Koperasi, dan Pariwisata

   Program Prioritas :

   a. Pembangunan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
   b. Pengembangan Kawasan Agropolitan (Ngawasondat, Pakancupung, Palempari, Segobatam);
   c. Revitalisasi Pertanian (Sinergitas Peran Petani, Perguruan Tinggi, Pelaku Usaha, dan Pemerintah);
   d. Pengembangan Pola Kemitraan Inti Plasma yang Berwawasan Pasar;
   e. Pengembangan *Smart*-Pertanian Melalui Pemanfaatan Inovasi Teknologi, salah satunya dikenal dengan DITO (Desa Inovasi Tani Organik);
   f. Optimalisasi Lahan Kurang Produktif (Lahan Pekarangan, Hidroponik);
   g. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas termasuk industri kreatif, inovasi produk, sertifikasi produk, aksesibilitas permodalan, pengelolaan keuangan serta akses pasar);
   h. Penguatan dan Pemberdayaan Koperasi;
   i. Pengembangan Ekonomi Digital (e-commerce);
   j. Peningkatan Investasi dan Daya Saing Produk Unggulan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Penggunaan teknologi informasi dan pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI);
   k. Pengembangan Pariwisata Daerah (Destinasi, Pengembangan Potensi Lokal, Kerjasama Daerah, Keterlibatan Stakeholder, Industri, Pemasaran dan Kelembagaan);
   l. Optimalisasi Perusahaan-Perusahaan Daerah (Bank Daerah PDP Margomulyo, PD Canda Bhirawa, dan PDAM);

2. Pembangunan Konektivitas

   Prioritas Nasional : Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

   Prioritas Provinsi : Pembangunan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Pelayanan Infrastruktur

Prioritas Kabupaten Kediri : Pembangunan Konektivitas antar Wilayah

Program Prioritas :

a. Program Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Kertosono-Kediri-Tulungagung, Jalan Tol SUBAKRI (Sukorejo-Batu-Kediri), Aksesibilitas Bandara Kediri
b. Jaringan Jalur Strategis antar wilayah Pusat Sub Wilayah Pengembangan Wilayah Kediri sekitarnya, meliputi :
   - Selingkar Wilis Tulungagung-Nganjuk-Trenggalek-Ponorogo-Madiun-Kediri (Tunggal Rogo Mandiri);
   - Jalan Lereng Kelud (Kepung-Puncu-Plosoklaten-Ngancar);
   - Jalan Surabaya-Jombang-Kediri-Blitar (melewati Pare dan Wates);
   - Jalan Surabaya-Kediri-Blitar (melewati Kandat);
   - Jalan Kediri-Nganjuk-Madiun
   - Jalan Malang-Kediri-Nganjuk-Madiun (melewati Papar); dan
   - Jalan Kediri-Tulungagung-Trenggalek (Melewati Mojo).
c. Peningkatan Jaringan Jalan Strategis antarkecamatan, antardesa, dan Desa dengan Ibukota Kecamatan.

3. Pembangunan Sumberdaya Manusia

Prioritas Nasional : SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Prioritas Provinsi : Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan, Perluasan Kesempatan Kerja serta Pengentasan Kemiskinan dengan Penggunaan Teknologi Informasi dan Pemanfaatan *artificial intelligence.*

Prioritas Kabupaten Kediri : Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, serta Pengentasan Kemiskinan

Program Prioritas :

a. Peningkatan Kualitas Pendidikan, meliputi :
   - Peningkatan Angka Transisi SD-SMP, SMP-SMA
   - Peningkatan Angka Partisipasi Kasar dan Murni SD, SMP
   - Keterjangkauan Layanan Pendidikan Dasar dan Menengah (Garis, Setara dan Berkualitas, Kearifan Lokal) Merdeka Belajar
   - Pemenuhan Kesejahteraan Tenaga Pendidik Non Kependidikan
   - Peningkatan Akreditasi Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah (Kompetensi Pendidik, Sarpras, Pengelolaan Lembaga, Keterlibatan *Stakeholder*)
   - Meningkatkan Angka Melek Aksara dan Budaya Baca (Kemampuan Literasi dan Numerasi)

b. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, meliputi
   - Kepesertaan Jaminan Kesehatan
   - Penerapan Pola Hidup Sehat Bagi Keluarga (Kecukupan Gizi, *Stunting, Wasting*, Anemia Bumil, *ODF Open Defecation Freel* atau Stop Buang Air Besar Sembarangan)
   - Keterjangkauan Layanan Kesehaatan
   - Menurunnya Angka Kematian Ibu dan Bayi

c. Penurunan Angka Kemiskinan, meliputi
   - Penanganan Kemiskinan Lintas Sektor
   - Penanganan Kemiskinan Sesuai Karakteristik Kemiskinan (Absolut, Struktural, Situasional) Secara Berkelanjutan

d. Peningkatan Kualitas dan Perlindungan Tenaga Kerja

e. Perlindungan Perempuan dan Anak, meliputi
   - Menurunnya Prevalensi Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan serta meningkatkan Penanganannya
   - Meningkatkan Pendewasaan Kawin Pertama pada Perempuan
   - Mendorong Peningkatan Kesetaraan Gender

4. Pembangunan Karakter

   Prioritas Nasional : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

   Prioritas Provinsi : Meningkatkan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal

   Prioritas Kabupaten Kediri : Revolusi Mental dan Nilai-nilai Kearifan Lokal

   Program Prioritas

   a. Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa
   b. Penanaman Nilai-nilai Nasionalisme dan Wawasan Kebangsaan
   c. Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme
   d. Peningkatan Nilai-nilai Toleransi dan Kerukunan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan)
   e. Penanaman Nilai-nilai Kearifan Lokal (Gotong-royong, Aspiratif, Kepedulian, dan Pengembangan Budaya Lokal)

5. Pembangunan Infrastruktur

   Prioritas Nasional : Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasa

   Prioritas Provinsi : Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengelolaan EBT

   Prioritas Kabupaten Kediri :Peningkatan Infrastruktur pada Pusat Produksi, Pusat Distribusi, dan Pelayanan Dasar

Program Prioritas :

a. Optimalisasi Pemanfaatan Sarpras Irigasi (Sel Sekunder, Tersier, P2AT, Hippa)
b. Peningkatan Infrastruktur pada Lahan Kering, Kurang Produktif, Kawasan Non Budidaya, dan Kawasan Terisolir
c. Pembangunan Embung (untuk pertanian, penanggulangan bencana, energi air)
d. Pembangunan Infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus (Kampung Inggris, SLG, kawasan bandara, PDP Margo Mulyo, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi)

6. Pembangunan Lingkunan Hidup dan Penanggulangan Bencana

   Prioritas Nasional : Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim

   Prioritas Provinsi : Peningkatan Ketahanan Bencana dan Lingkungan Hidup melalui Pengarusutamaan Upaya Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

   Prioritas Kabupaten Kediri : Peningkatan Ketahanan Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup

   Program Prioritas :

   a. Penegakan Peraturan Lingkungan Hidup, (Kawasan Non Budidaya/ Lindung, Polusi Udara, Tanah dan Air)
   b. Penanganan dan Pengelolaan Persampahan
   c. Peningkatan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
   d. Mitigasi dan Deteksi Dini Daerah Rawan Bencana

7. Peningkatan Stabilitas Daerah dan Pelayanan Publik

   Prioritas Nasional : Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

   Prioritas Provinsi : Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur

   Prioritas Kabupaten Kediri :Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelayanan Publik melalui Pemerintahan yang Profesional

   Program Prioritas :

   a. Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   b. Reformasi Birokrasi melalui 8 Area Perubahan, meliputi
      - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
      - Penataan dan Penguatan Organisasi
      - Manejemen Perubahan dengan Mengubah Pola Komunikasi Pemimpin-Rakyat
      - Peningkatan Kualitas SDM dan Kesejahteraan Aparatur

- Akuntabilitas Kinerja
- Peraturan Perundang-Undangan
- Tatalaksana
- Penguatan Pengawasan dengan Pengembangan *E-government (planning, budgeting, procurement, auditing, controlling, evaluating*)

Program prioritas tersebut diatas diharapkan Kabupaten Kediri ke depannya akan menjadi lebih baik, adapun yang menjadi tanggung jawab Dinas P2KBP3A Kabupaten Kediri dalam mensukseskan program prioritas adalah *Pembangunan Sumber Daya Manusia* dengan program prioritas Perlindungan Perempuan dan Anak yang meliputi :

a. Menurunnya Prevalensi Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan serta meningkatkan Penanganannya

   Yaitu mengupayakan adanya penurunan kasus kekerasan kepada perempuan dan anak diantaranya melalui penyusunan payung hukum terhadap perlindungan perempuan dan anak, sosialisasi perlindungan terhadap perempuan dan anak, mendorong masyarakat untuk melapor bila ada tindak kekerasan, peningkatan koordinasi dengan pihak terkait, peningkatan layanan di P2TP2A, pembentukan satuan tugas sampai di tingkat desa serta pemberian fasilitasi, advokasi dan pendampingan pada perempuan dan anak yang menghadapi masalah hukum

b. Meningkatkan Pendewasaan Kawin Pertama pada Perempuan

   Yaitu mengupayakan adanya penurunan perkawinan dini pada perempuan sehingga akan menurunkan angka kematian ibu bayi dan balita serta pengendalian angka kelahiran serta menurunkan angka kehamilan yang tidak diinginkan, mencegah terjadinya stunting serta peningkatan perlindungan terhadap perempuan. Upaya yang akan dilaksanakan melalui peningkatan koordinasi dengan pihak terkait, peningkatanan Komunikasi Edukasi Informasi (KIE) dan advokasi tentang kesehatan reproduksi remaja, mendorong desa untuk membuat peraturan tentang perkawinan dini dan peningkatan pelayanan KB

c. Mendorong Peningkatan Kesetaraan Gender

   Yaitu mengupayakan adanya kesetaraan antara perempuan/gender dengan laki-laki sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal politik, hukum, dan ekonomi melalui peningkatan koordinasi dengan pihak terkait, pemberian pelatihan dan pembinaan kepada kelompok wanita, mendorong stekholder untuk lebih responsip gender, mengupayakan adanya payung hukum terhadap pengarusutamaan gender.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Kediri, maka DINAS P2KBP3A Kabupaten Kediri berperan dalam merumuskan tujuan, sasaran dan program perangkat daerah yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Melihat identifikasi permasalahan di DINAS P2KBP3A Kabupaten Kediri dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan DINAS P2KBP3A Kabupaten Kediri, sebagai berikut :

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 1 : Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius Tujuan : Meningkatkan upaya pengendalian penduduk Sasaran 1 : Meningkatkan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan keluarga berencana	1. Lemahnya kelembagaan dan jaringan Pengarusatamaan Gender (PUG) serta belum optimalnya kinerja Pokja PUG Kabupaten Kediri; 2. Belum optimal nya OPD yang melaksanakan PUG 3. Belum optimal nya pember dayaan perempuan terutama kelompok perempuan 4. Masih adanya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; 5. Pencapaian indikator KLA belum optimal; 6. Pengaruh teknologi informasi pada	1. Perencanaan, pelaksanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. 2. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender 3. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. 4. Lembaga KB yang digabung belum dapat menampung totalitas 5. Penataan petugas yang belum tuntas utamanya PKB/PLKB berakibat terjadi	1. Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan 2. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A serta dengan lembaga swasta 3. Komitmen yang kuat secara politis dan pragmatis 4. Secara bertahap dukungan dana operasional , pelayanan KB semakin meningkat 5. PPKBD Dan Sub PPKBD sampai tingkat RW. 6. Terbentuknya Tim Koalisi Kependudukan

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		anak usia remaja yang tidak diimbangi dengan pemahaman yang benar berdampak buruk terjadinya kejahatan seksual, tindak kekerasan dan perdagangan orang, perilaku seks bebas, penggunaan narkoba dan kasus perkawinan usia muda. 7. Belum maksimalnya pemenuhan hak anak dan implementasi Kabupaten layak anak 8. Masih kurangnya Forum Anak tingkat Kecamatan dan desa yang terbentuk	penurunan kinerja program KB 6. Jumlah penduduk cukup tinggi namun kualitas masih rendah 7. Unmet need masih tinggi 8. Belum Optimalnya Program Koalisi Kependudukan	
		9. Belum adanya Pusat Kreativitas Anak (PKA) sesuai standar 10. Jumlah layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) Ramah Anak masih terbatas 11. Belum terlaksanya kegiatan perlindungan		

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		anak terpadu berbasis masyarakat 12. Masih adanya perkawinan pertama umur istri kurang dari 20 tahun 13. Belum optima lnya penyedia an data mikro di kelurahan 14. Penerimaan masyarakat terhadap program KB khususnya Kontrasepsi Mantap MOP belum optimal ; 15. Terbatasnya tenaga fungsi onal Penyuluh KB/PLKB sebagai dampak akibat banyak nya petugas yang purna tugas dan alih peran yang sangat berpe ngaruh dalam operasio nal tugas bidang KB di lapangan ; 16. Kurang optimal nya Peran rema ja dalam pening katan kesehat an reproduksi remaja; **17.** Belum optimal nya peran kader TRIBINA (BKB,BKR,BKL) di tingkat desa		

3.3 Telaahan Terhadap Renstra K/L dan Rentra Provinsi

Telaahan terhadap Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dan Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra DINAS P2KBP3A Kabupaten Kediri. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergisasi antara Renstra DINAS P2KBP3A Kabupaten Kediri dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur dan Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah Pusat (K/L) dengan Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Kediri.

Tabel 3.1
Permasalahan Pelayanan DINAS P2KBP3A Kabupaten Kediri berdasarkan Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur terkait beserta faktor penghambat dan pendorong

No.	Renstra K/L	Renstra PD Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan DINAS P2KBP3A Kabupaten Kediri	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1.	Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki sebesar Rp14.150 ribu per bulan, dan Rp 8.316 ribu perbulan untuk penduduk perempuan.	- Belum Optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender di semua sektor pembangunan - Belum tersedianya data terpilah	Belum optimalnya peningkatan Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan pengangaran responsif gender	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
2.	Belum semua sekolah di Indonesia termasuk kategori sekolah ramah anak.	- Masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak - Rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sektor dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang	Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) (SD, MI, SMP, MTs) masih terbatas	Meningkatkan capaian Kabupaten layak anak	Meningkatkan sarana dan prasarana Kabupaten layak anak
4.	Penguatan Data dan Informasi kependudu	Database kependudukan belum	Belum optimalnya	Belum optimalnya	Pemerintah propinsi kab/

No.	Renstra K/L	Renstra PD Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan DINAS P2KBP3A Kabupaten Kediri	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	kan, KB dan KS	sepenuhnya akurat.	penyediaaan data mikro di kelurahan/desa	program koalisi kependudukan	Kota berusaha untuk melaksanakan semua program KB dan kependudukan yang ada, alau pun bentuk lembaga nya bervariasi
5.	Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB	1. Masih rendahnya Tingkat kesadaran menjadi akseptor KB bagi kaum laki-laki. 2. Kurangnya alat kontrasepsi KB 3. Kurang signifikan nya kenaikan contrasep tive prevalence rate (CPR) atau cakupan KB aktif 4. Belum terpenuhi nya pelayanan unmet need 5. Sarana dan Prasarana terbatas. 6. Kompetensi SDM terbatas 7. Rendahnya kesada ran masyarakat tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP). 8. Budaya & Agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi.	Penerimaan masyarakat terhadap program KB khususnya Kontrasepsi Mantap MOP belum optimal ;	Jumlah penduduk cukup tinggi namun kualitas masih rendah	Secara bertahap dukungan dana operasional , pelayanan KB meningkat
6.	Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga	1. Belum optimalnya upaya pendewasaan usia pernikahan 2. Sarana dan Prasarana terbatas. 3. Kompetensi SDM terbatas	Kurang optimalnya Peran remaja dalam peningkatan kesehatan reproduksi remaja;	Adanya perkawinan pada usia dibawah 20 tahun	Terbentuknya komitmen pemerintah daerah untuk menurunkan perkawinan dini

3.4 Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebelum melakukan analisa lingkungan perlu dilakukan identifikasi faktor faktor lingkungan yang mempengaruhi organisasi, baik faktor internal maupun faktor eksternal yang diklasifikasikan dalam *Kekuatan (Strength=S), Kelemahan (Weakness=W)* serta mempertimbangkan *Peluang (Oportunity=O)* dan *Ancaman (Threats=T)*. Identifikasi ini sangat penting sebagai bahan analisis lingkungan dalam menetapkan strategi organisasi.

A. Kondisi Lingkungan Internal
   1. Kekuatan (Strength)
      - Komitmen pimpinan yang tinggi terhadap tujuan organisasi
      - Sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang pelaksanaan program dan kegiatan
      - Keberadaan Penyuluh Keluarga Berencana yang tersebar di seluruh kecamatan
      - Koordinasi yang baik dengan mitra kerja
      - Kualitas sumber daya manusia yang memadai
   2. Kelemahan (Weakness)
      - Gedung kantor tidak memiliki ruang pertemuan yang memadai
      - Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana yang masih kurang dimana 1 penyuluh masih membawahi 5 sampai 9 desa
      - Kurangnya sosialisasi program dan kegiatan kepada masyarakat
      - Kurangnya advokasi program dan kegiatan kepada pemangku kebijakan
      - Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi lintas program

B. Kondisi Lingkungan Eksternal
   1. Peluang *(Oportunity)*
      - Dukungan dana baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan
      - Institusi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang berbentuk Dinas
      - Adanya dukungan dan komitmen politis dalam penggalakan program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
      - Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan program yang dibutuhkan masyarakat secara berkelanjutan
      - Adanya Institusi Masyarakat Pedesaan yang dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan (PPKBD dan Sub PPKBD)

2. Ancaman *(Threats)*
   - Besarnya jumlah penduduk yang tidak disertai kualitas SDM yang tinggi
   - Masih tingginya jumlah penduduk miskin
   - Belum optimalnya peran dan fungsi institusi masyarakat pedesaan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan
   - Tingginya unmet need

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dengan memperhatikan hasil penelaahan isu-isu strategis pada agenda nasional dan provinsi, serta implikasi RTRW dan KLHS bagi DINAS P2KBP3A, maka isu strategis dalam Renstra DINAS P2KBP3A Kabupaten Kediri Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

a. Masih minimnya SDM tentang pemahaman peraturan perlindungan perempuan dan anak sebagai aparatur yang menangani bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
b. Masih banyaknya kasus tindak kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak yang belum terlaporkan
c. Masih kurangnya peranan dan koordinasi organisasi perempuan dan lembaga terhadap perlindungan Perempuan dan Anak
d. Lemahnya kelembagaan dan jaringan Pengarusutamaan Gender (PUG) serta belum maksimalnya kinerja Pokja PUG Kabupaten Kediri
e. Tingginya angka kelahiran
f. Penerimaan masyarakat terhadap program KB khususnya Kontrasepsi Mantap MOP belum optimal
g. Terbatasnya tenaga fungsional Penyuluh KB/PLKB sebagai dampak banyaknya petugas yang purna tugas dan alih peran yang sangat berpengaruh dalam operasional tugas bidang KB di lapangan
h. Peran remaja dalam peningkatan kesehatan reproduksi remaja kurang optimal
i. Sering berganti gantinya kader tribina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia) dan kurangnya partisipasi keluarga untuk ikut kegiatan tribina

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Kabupaten Kediri 2021- 2026, DINAS P2KBP3A menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : ***Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Keluarga***, yaitu merupakan tujuan dalam upaya pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas P2KPBP3A Kabupaten Kediri untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan indikator meningkatnya prosentase tahapan keluarga sejahtera. Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada misi ke 1 (satu) Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026 yang berbunyi ***"*Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius".**

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DINAS P2KBP3A Kabupaten Kediri seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri DINAS P2KBP3A Kabupaten Kediri.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, DINAS P2KBP3A Kabupaten Kediri menetapkan sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatnya upaya pengendalian penduduk

   Merupakan upaya dalam menekan jumlah pertambahan penduduk di kabupaten kediri. Dengan terkendalinya pertumbuhan penduduk diharapkan pembangunan di Kabupaten Kediri dapat menjadi lebih penyentuh pada masyarakat Kabupaten Kediri. Diketahui bahwa tidak akan berarti bila pembangunan yang tengah dilaksanakan tidak diimbangi dengan terkendalinya laju pertumbuhan penduduk. Yang menjadi indikator keberhasilan pada sasaran ini adalah jumlah kelahiran per seribu penduduk dalam satu tahun.

b. Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan

   Merupakan upaya meningkatnya kesamaan hak dan kewajiban antara laki-laki, perempuan dan disabilitas sera anak-anak yang disebut kesamaan gender baik dalam perlindungan maupun pembangunan. Peningktnya peran aktif gender diharapkan mempercepat pembangunan di Kabupaten Kediri. Indikator untuk pencapaian sasaran ini adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran DINAS P2KBP3A, maka ditetapkan indikator sasaran beserta target tahun 2021-2026, sebagai berikut :

Tabel 4.1
Indikator Tujuan, Sasaran dan Target DINAS P2KBP3A
Kabupaten Kediri Tahun 2021 - 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Kesejahteraan Massyarakat Berbasis Keluarga		Persentase Keluarga Sejahtera	70,61	71,11	71,61	72,11	72,61	73,11
2		Meningkatnya upaya pengendali an penduduk	Crude Brith Rate (CBR)	16,8	15,59	15,39	15,19	14,99	14,79
3		Meningkatnya kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan	IPG (Indeks Pembangun an Gender)	93,13	93,19	93,25	93,31	93,37	93,43

Keterangan :

Persentase Keluarga Sejahtera = Jumlah Keluarga Sejahtera Tahap II,III dan III Plus / Jumlah kelurga

Crude Brith Rate (CBR) = Banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama (Jumlah kelahiran / Jumlah Penduduk) X 1000

IPG = IPM perempuan / IPM laki-laki
Cara menghitungnya dengan perlu menghitung IPM laki-laki dan perempuan, IPM IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (i) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), (ii) Pengetahuan (knowledge), dan (iii) Standar hidup layak (decent standard of living)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran RPJMD yang dijabarkan dalam tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran perangkat daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, maka penting untuk membangun strategi dan kebijakan yang efektif dan efisien.Dalam melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, maka strategi dijabarkan lebih lanjut dalam arah kebijakan. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan DINAS P2KBP3A Kabupaten Kediri dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, Serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani** MISI I : **Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius**			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kesejahteraan Massyarakat Berbasis Keluarga	Meningkatnya upaya pengendalian penduduk	Penguatan Program Keluarga Berencana	1. Penyebarluasan program Bangga Kencana sampai ke desa 2. Fasilitasi pendampingan tenaga penyuluh di kegiatan masyarakat 3. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi calon akseptor KB 4. Penyediaan layanan konseling keluarga
	Meningkatkan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan	Pengarusutamaan gender dalam pembangunan	**1.** Pemberdayaan perempuan di setiap kegiatan pembangunan **2.** Perlindungan perempuan dan anak dari kasus kekerasan

VISI : **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri Yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, Serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan Yang Didukung Birokrasi Yang Melayani** MISI I : **Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius**			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3. Penyediaan pusat pendampingan dan konsultasi bagi perempuan dan anak

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan Visi-Misi Kepala Daerah, serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran DINAS P2KBP3A disusun program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pendanaan dalam renstra ini yang disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan DINAS P2KBP3A

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN , PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Meningkatnya upaya pengendalian penduduk				***Crude Birth Rate (CBR)***		**16,8**		15,99		**15,39**		**15,19**		**14,99**		**14,79**		**14,79**			
	Meningkatkan kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dan anak dalam pembangunan			***IPG (Indeks Pembangunan Gender***		**93,13**		**93,19**		**93,25**		**93,31**		**93,37**		**93,43**		**93,43**		**Dinan P2KBP 3A**	
		2.08.02	***PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN***	***Persentase OPD yang responsif gender***	100%			100%	**247.000.000**	100%	**399.503.620**	100%	**449.453.850**	100%	**504.399.375**	100%	**504.399.375**	100%	**504.399.375**		
		2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah OPD yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan**	63 opd			63 opd		63 opd		63 opd		63 opd		63 opd		63 opd			
		2.08.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah dokumen kebijakan PUG	1 dokumen	1 dokumen	92.988.000	1 dokumen	92.000.000	1 dokumen	121.568.810	1 dokumen	133.725.650	1 dokumen	147.098.250	1 dokumen	147.098.250	1 dokumen	147.098.250		Kab Kediri
		2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah OPD yang mendapatkan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	63 opd			63 opd	80.000.000	63 opd	102.517.810	63 opd	122.769.500	63 opd	145.046.550	63 opd	145.046.550	63 opd	145.046.550		Kab Kediri
		2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan**	**Jumlah kelompok yang mendapat sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan**	35 kelompok			35 kelompok		35 kelompok		35 kelompok		35 kelompok		35 kelompok		35 kelompok			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN , PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Kewenangan Kabupaten/Kota																		
		2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah kelompok yang mendapat sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan	35 kelompok	35 kelompok	11.997.500	35 kelompok	75.000.000	35 kelompok	175.417.000	35 kelompok	192.958.700	35 kelompok	212.254.575	35 kelompok	212.254.575,00	35 kelompok	212.254.575		Kab Kediri
		2.08.03	***PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN***	***Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tangani oleh P2TP2A***	100%			100%	**21.310.000**	100%	**123.441.000**	100%	**125.785.100**	100%	**128.363.600**	100%	**128.363.600**	100%	**128.363.600**		
		2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen kebijakan perlindungan perempuan**	1 dok			1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok			Kab Kediri
		2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan perlindungan perempuan	1 dok	1 dok	50.722.500	1 dok	4.110.000	1 dok	54.521.000	1 dok	54.973.100	1 dok	55.470.400,00	1 dok	55.470.400,00	1 dok	55.470.400		Kab Kediri
		2.08.03.2.02	**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi**	**Layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan**	**12 bulan**			**12 bulan**		**12 bulan**		**12 bulan**		**12 bulan**		**12 bulan**		**12 bulan**			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN , PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Kewenangan Kabupaten/Kota																		
		2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	12 bulan	12 bulan	23.705.400	12 bulan	17.200.000	12 bulan	68.920.000	12 bulan	70.812.000	12 bulan	72.893.200,00	12 bulan	72.893.200,00	12 bulan	72.893.200		Kab Kediri
		2.08.04	***PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA***	***Peresentase Kegiatan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilaksanakan di tingkat desa***				***85%***	***209.996.000***	***86%***	***323.486.080,00***	***86%***	***360.834.700,00***	***88%***	***401.918.100,00***	***88%***	***401.918.100,00***	***88%***	***401.918.100***		
		2.08.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Pelaksanaan event	3 event			3 event		3 event		3 event		3 event		3 event		3 event			Kab Kediri
		2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan event	3 event	3 event	96.604.400	3 event	150.000.000	3 event	257.490.480	3 event	288.239.550	3 event	322.063.450	3 event	322.063.450	3 event	322.063.450		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN , PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.08.04.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen rekomendasi jejaring layanan perlindungan perempuan**				**1 dokumen**		**1 dokumen**		**1 dokumen**		**1 dokumen**		**1 dokumen**		**1 dokumen**			
		2.08.04.2.02.03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi jejaring layanan perlindungan perempuan				1 dokumen	59.996.000	1 dokumen	65.995.600	1 dokumen	72.595.150,00	1 dokumen	79.854.650,00	1 dokomen	79.854.650,00	1 dokomen	79.854.650,00		Kab Kediri
		2.08.07	***PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK***	***Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan oleh P2TP2A***	**80%**			**82%**	**170.000.000**	**85%**	**443.465.830**	**87%**	**492.812.400**	**89%**	**563.917.275**	**90%**	**606.802.900**	**90%**	**606.802.900**		
		2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen kebijakan perlindungan anak**	1 dokumen			1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
		2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan perlindungan anak	1 dokumen	1 dok	20.723.700	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	139.039.010	1 dokumen	152.942.900	1 dokumen	185.060.900	1 dokumen	185.060.900	1 dokumen	185.060.900		Kab Kediri

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN , PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.08.07.2.02	**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan pemenuhan hak anak**	1 dokumen			**1 dokumen**		**1 dokumen**		**1 dokumen**		**1 dokumen**		**1 dokumen**		**1 dokumen**			
		2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan pemenuhan hak anak	1 dokumen	1 dok	25.893.600	1 dokumen	60.000.000	1 dokumen	191.539.320	1 dokumen	215.693.250,00	1 dokumen	242.262.500,00	1 dokumen	271.488.800,00	1 dokumen	271.488.800		Kab Kediri
		2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindunga Khusus Tingkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah peserta rapat koordinasi perlindungan dan tumbuh kembang anak**	80 orang			**100 orang**		**100 orang**		**100 orang**		**100 orang**		**100 orang**		**100 orang**			
		2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta rapat koordinasi perlindungan dan tumbuh kembang anak	80 orang	100 orang	3.145.000	100 orang	50.000.000	100 orang	112.887.500	100 orang	124.176.250	100 orang	136.593.875	100 orang	150.253.200	100 orang	150.253.200		Kab Kediri

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN , PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.14.01	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH***	***Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah***	***80%***			***80%***	***5.390.266.292***	***80%***	***6.902.716.270,00***	***80%***	***7.240.865.000,00***	***80%***	***7.566.855.700,00***	***80%***	***7.544.635.450,00***	***80%***	***7.544.635.450,00***		
		2.14.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan evaluasi Perangkat Daerah**	**2 jenis dokumen**			**2 jenis dokumen**		**2 jenis dokumen**		**2 jenis dokumen**		**2 jenis dokumen**		**2 jenis dokumen**	**6.938.801.250,00**	**2 jenis dokumen**	**6.938.801.250,00**		
		2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 dok	2 dok	3.616.930	2 dok	50.100.000	2 dok	55.110.000	2 dok	55.621.000	2 dok	60.683.100	2 dok	61.683.100	2 dok	61.683.100		Kab Kediri
		2.14.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Domunen RKA SKPD	Jumlah Domuken RKA	1 dokumen			1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.200.000	1 dokumen	2.420.000,00	1 dokumen	2.662.000,00	1 dokumen	2.662.000,00	1 dokumen	2.662.000,00		Kab Kediri
		2.14.01.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Domunen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Domuken Perubahan RKA	1 dokumen			1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.200.000	1 dokumen	2.420.000,00	1 dokumen	2.662.000,00	1 dokumen	2.662.000,00	1 dokumen	2.662.000,00		Kab Kediri
		2.14.01.2.01.06	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	2 dok	2 dok	2.742.190	2 dok	40.950.000	2 dok	45.045.000	2 dok	45.549.500,00	2 dok	50.504.450,00	2 dok	51.504.450,00	2 dok	51.504.450,00		Kab Kediri
		2.14.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan**	12 laporan			12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		12 laporan			
		2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	12 laporan	12 lap	3.859.183.692	12 laporan	4.068.958.692	12 laporan	5.253.495.770	12 laporan	5.470.724.040,00	12 laporan	5.619.750.600,00	12 laporan	5.415.394.800,00	12 laporan	5.415.394.800,00		Kab Kediri
		2.14.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan	12 lap	124.800.000	12 laporan	137.280.000	12 laporan	340.000.000	12 laporan	355.000.000,00	12 laporan	373.000.000,00	12 laporan	410.300.000,00	12 laporan	410.300.000,00		Kab Kediri

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN , PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.14.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan verifikasi penatausahaan	12 laporan	12 lap	108.580.000	12 laporan	350.000.000	12 laporan	385.000.000	12 laporan	418.500.000,00	12 laporan	465.850.000,00	12 laporan	509.435.000,00	12 laporan	509.435.000,00		Kab Kediri
		2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan SKPD	1 dokumen	1 dok	6.950.750	1 dokumen	7.645.825	1 dokumen	8.410.000	1 dokumen	9.252.000,00	1 dokumen	10.177.000,00	1 dokumen	11.200.000,00	1 dokumen	11.200.000,00		Kab Kediri
		2.14.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan bulanan /semesteran	1 dokumen	1 dok	6.950.310	1 dokumen	7.645.825	1 dokumen	8.410.000	1 dokumen	9.250.000,00	1 dokumen	10.120.000,00	1 dokumen	11.200.000,00	1 dokumen	11.200.000,00		Kab Kediri
		2.14.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**12 laporan**			**12 laporan**		**12 laporan**		**12 laporan**		**12 laporan**		**12 laporan**		**12 laporan**			
		2.14.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	12 lapporan	12 lap	15.600.000	12 lapporan	17.160.000	12 lapporan	18.876.000	12 lapporan	20.763.600,00	12 lapporan	22.840.000,00	12 lapporan	25.130.000,00	12 lapporan	25.130.000,00		Kab Kediri
		2.14.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian**	12 dokumen			12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			
		2.14.01.2.05.01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah sarana dan prasana yg tepenuhi	12 paket			12 paket	12.000.000	12 paket	13.200.000	12 paket	14.520.000,00	12 paket	15.972.000,00	12 paket	17.569.200,00	12 paket	17.569.200,00		Kab Kediri
		2.14.01.2.05.03	Pendataan dan Pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	12 laporan			12 laporan	4.000.000	12 laporan	4.400.000	12 laporan	4.840.000,00	12 laporan	5.324.000,00	12 laporan	5.856.400,00	12 laporan	5.856.400,00		Kab Kediri
		2.14.01.2.05.04	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah laporan data pegawai	12 laporan			12 laporan	12.000.000	12 laporan	13.200.000	12 laporan	14.520.000,00	12 laporan	15.972.000,00	12 laporan	17.569.200,00	12 laporan	17.569.200,00		Kab Kediri
		2.14.01.2.05.10	Sosialisasi peraturan perundang - undangan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	4 kali			4 kali	4.000.000	4 kali	4.400.000	4 kali	4.840.000,00	4 kali	5.324.000,00	4 kali	5.856.400,00	4 kali	5.856.400,00		Kab Kediri

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN , PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.14.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa**	**12 laporan**			**12 laporan**		**12 laporan**		**12 laporan**		**12 laporan**		**12 laporan**		**12 laporan**			
		2.14.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	1 paket	1 paket	789.700	1 paket	869.000	1 paket	956.000	1 paket	1.050.000,00	1 paket	1.157.000,00	1 paket	1.272.000,00	1 paket	1.272.000,00		Kab Kediri
		2.14.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	1 paket	1 paket	2.146.200	1 paket	2.360.000	1 paket	2.597.000	1 paket	2.856.500,00	1 paket	3.145.000,00	1 paket	3.456.500,00	1 paket	3.456.500,00		Kab Kediri
		2.14.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket pengadaan	3 paket	3 paket	7.263.650	3 paket	7.263.650	3 paket	8.789.000	3 paket	9.668.000,00	3 paket	10.635.000,00	3 paket	11.699.000,00	3 paket	11.699.000,00		Kab Kediri
		2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket pengadaan	12 paket	12 paket	3.000.000	12 paket	3.300.000	12 paket	3.630.000	12 paket	3.993.000,00	12 paket	4.392.300,00	12 paket	4.832.000,00	12 paket	4.832.000,00		Kab Kediri
		2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	12 laporan	12 laporan	22.116.000	12 laporan	150.000.000	12 laporan	165.000.000	12 laporan	174.500.000,00	12 laporan	199.650.000,00	12 laporan	219.615.000,00	12 laporan	219.615.000,00		Kab Kediri
		2.14.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah daftar arsip aktif	1 dokumen	1 dokumen	2.400.000	dokumen	2.640.000	dokumen	2.904.000	dokumen	3.194.500,00	dokumen	3.514.000,00	dokumen	3.865.000,00	dokumen	3.865.000,00		Kab Kediri
		2.14.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 laporan**			**12 laporan**		**12 laporan**		**12 laporan**		**12 laporan**		**12 laporan**		**12 laporan**			
		2.14.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	12 paket	12 paket	2.345.600	12 paket	2.580.000	12 paket	2.838.000	12 paket	3.122.000,00	12 paket	3.434.000,00	12 paket	3.778.000,00	12 paket	3.778.000,00		Kab Kediri
		2.14.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	7.691.200	12bulan	14.461.000	12bulan	15.907.100	12bulan	17.497.810,00	12bulan	19.247.600,00	12bulan	21.172.350,00	12bulan	21.172.350,00		Kab Kediri

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN , PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah paket pelayanan umum kantor	1 paket	1 paket	24.827.850	1 paket	77.711.000	1 paket	85.482.100	1 paket	90.030.300,00	1 paket	103.433.300,00	1 paket	113.776.650,00	1 paket	113.776.650,00		Kab Kediri
		2.14.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara**	4 laporan			4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan		4 laporan			
		2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa	1 paket	1 paket	54.460.500	1 paket	54.460.500	1 paket	65.897.500	1 paket	72.487.000,00	1 paket	79.736.000,00	1 paket	87.709.000,00	1 paket	87.709.000,00		Kab Kediri
		2.14.01.2.09.05	Pemelihiaraan Mebel	Jumlah jasa	1 paket			1 paket	15.000.000	1 paket	16.500.000	1 paket	18.150.000,00	1 paket	19.965.000,00	1 paket	21.961.500,00	1 paket	21.961.500,00		Kab Kediri
		2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 paket	1 paket	5.000.000	1 paket	8.880.800	1 paket	9.768.800	1 paket	10.745.750,00	1 paket	11.820.350,00	1 paket	13.002.400,00	1 paket	13.002.400,00		Kab Kediri
		2.14.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	1 paket	1 paket	7.761.600	1 paket	210.000.000	1 paket	231.000.000	1 paket	254.100.000,00	1 paket	279.510.000,00	1 paket	307.461.000,00	1 paket	307.461.000,00		Kab Kediri
		2.14.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana**	**unit**			**unit**		**unit**		**unit**		**unit**		**unit**		**unit**			
		2.14.01.2.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.	1 paket			1 paket	125.000.000	1 paket	137.500.000	1 paket	151.250.000,00	1 paket	166.375.000,00	1 paket	183.012.500,00	1 paket	183.012.500,00		Kab Kediri
	Meningkatnya pelayanan keluarga berencana			**Unmeet deed**	**10,56%**	**10,47%**		**10,38%**		**10,29 %**		**10,20%**		**10,10%**		**10%**		**10%**			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN , PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.14.02	***PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK***	***Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga***	100%			***100 %***	***411.752.550***	***100 %***	***389.489.500***	***100 %***	***423.450.500***	***100 %***	***458.541.500,00***	***100 %***	***435.541.500,00***	***100 %***	***435.541.500,00***		
		2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Jenis implementasi sinkronsasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk**	**2 jenis**			**2 jenis**		**2 jenis**		**2 jenis**		**2 jenis**		**2 jenis**		**2 jenis**			
		2.14.02.2.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah dokumen bahan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk	1 dokumen			1 dokumen	5.500.000	1 dokumen	31.000.000	1 dokumen	32.200.000,00	1 dokumen	33.640.000,00	1 dokumen	33.640.000,00	1 dokumen	33.640.000,00		Kab Kediri
		2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi pemanfaatnya GDPK	1 dokumen			1 dokumen	6.736.500	1 dokumen	32.400.000	1 dokumen	33.800.000,00	1 dokumen	35.581.000,00	1 dokumen	35.581.000,00	1 dokumen	35.581.000,00		Kab Kediri
		2.14.02.2.01.05	Penguatan Kerja sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah SSK yang mendapatkan pembinaan	11 sekolahan	11 sekolakan	332.74.500	12 sekolahan	36.601.950	12 sekolahan	40.262.500	13 sekolahan	44.288.500,00	13 sekolahan	48.717.500,00	14 sekolahan	48.717.500,00	14 sekolahan	48.717.500,00		Kab Kediri
		2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten /Kota**	**Jumlah dokumen evaluasi Program KKBPK**	**1 dokumen**			**1 dokumen**		**1 dokumen**		**1 dokumen**		**1 dokumen**		**1 dokumen**		**1 dokumen**			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN , PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen profil KKBPK yang disusun	1 dokumen	1 dok	11.123.800	1 dokumen	14.400.000	1 dokumen	23.458.000	1 dokumen	24.806.000,00	1 dokumen	26.286.500,00	1 dokumen	26.286.500,00	1 dokumen	26.286.500,00		Kab Kediri
		2.14.02.2.02.11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah dokumen laporan data dan informasi keluarga	1 dokumen	1 dok	10.050.000	1 dokumen	186.000.000	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	31.250.000,00	1 dokumen	37.500.000,00	1 dokumen	37.500.000,00	1 dokumen	37.500.000,00		Kab Kediri
		2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah dokumen laporan capaian program bangga kencana	1 dokumen	1 dok	126.842.600	1 dokumen	124.642.600	1 dokumen	153.479.500	1 dokumen	168.827.500,00	1 dokumen	185.710.500,00	1 dokumen	185.710.500,00	1 dokumen	185.710.500,00		Kab Kediri
		2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen laporan pengendalian lapangan	1 dokumen	1 dok	1.651.200.000	1 dokumen	17.508.500	1 dokumen	44.250.000	1 dokumen	46.175.000,00	1 dokumen	46.292.500,00	1 dokumen	23.292.500,00	1 dokumen	23.292.500,00		Kab Kediri
		2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan RR klinik	89 klinik	90 klinik	20.363.000	100 klinik	20.363.000	110 klinik	39.639.500	110 klinik	42.103.500,00	110 klinik	44.813.500,00	110 klinik	44.813.500,00	110 klinik	44.813.500,00		Kab Kediri
		2.14.03	***PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)***	**Persentase Peserta KB aktif**	***60,74 %***	***62,28%***		***63,83%***	***10.114.979.200***	***65,37%***	***7.605.138.250,00***	***66,37%***	***7.255.647.150,00***	***68,46%***	***6.840.961.500,00***	***70,00%***	***7.025.619.775,00***	***70,00%***	***16.802.264.375,00***		
		2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Jenis kegiatan advokasi dan KIE yang mendukung program KKBPK**	**5 jenis**			**5 jenis**		**5 jenis**		**5 jenis**		**5 jenis**		**5 jenis**		**5 jenis**			
		2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah peserta yang mendapatkan KIE program KKBPK	6000 akseptor	6000 aksep tor	117.964.000	6500 aksep tor	161.154.000	7000 aksep tor	150.736.500	7000 aksep tor	157.010.000,00	7000 aksep tor	172.711.000,00	7500 aksep tor	172.711.000,00	35000 aksep tor	814.322.500,00		Kab Kediri

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN , PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah peserta rakor tentang KIE yang sesuai dengan kearifan lokal	150 orang	150 orang	26.199.470	150 orang	58.447.700	150 orang	31.702.000	150 orang	34.872.000,00	150 orang	38.359.000,00	150 orang	38.359.000,00	150 orang	38.359.000,00		Kab Kediri
		2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah kecamatan yang mendapatkan sarana KIE program KKBPK	26 kecamatan	26 kec	258.718.400	26 kec	258.718.400	26 kec	210.493.300	26 kec	204.025.350,00	26 kec	160.454.300,00	26 kec	150.600.700,00	26 kec	150.600.700,00		Kab Kediri
		2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah media yang digunakan untuk mendukung program KKBPK	5 media	5 media	29.998.980	5 media	32.158.000	5 media	36.298.000	5 media	39.929.000,00	5 media	43.921.500,00	5 media	43.921.500,00	5 media	43.921.500,00		Kab Kediri
		2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah balai penyuluhan KB yang mendapatkan operasional	26 balai penyuluhan	26 bpkb	1.688.552.640	26 balai penyuluhan	1.688.552.600	26 balai penyuluhan	888.552.000	26 balai penyuluhan	888.552.000	26 balai penyuluhan	888.552.000	26 balai penyuluhan	800.201.800,00	26 balai penyuluhan	800.201.800,00		Balai Penyuluhan KB
		2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Persentase tenaga penyuluh KB yang mendapatkan pembinaan**	**90%**			**90%**		**90%**		**90%**	**-**	**90%**	**-**	**90%**	**-**	**90%**	**-**		
		2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana /Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PKB yang dibina				60 orang	16.536.000	60 orang	18.189.600	60 orang	20.008.500,00	60 orang	22.009.400,00	60 orang	22.009.400,00	60 orang	22.009.400,00		Kab Kediri

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN , PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Ketersediaan kader penyuluh sampai tingkat dusun	3335 orang	3335 orang	2.765.730.000	3335 orang	4.003.143.500	3335 orang	2.738.337.850	3335 orang	2.546.375.000,00	3335 orang	2.546.375.000,00	3335 orang	2.547.141.975,00	3335 orang	2.547.141.975,00		Kab Kediri
		2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten /Kota**	**Jenis pelayanan dan pendistribusian alkon**	4 jenis			90,00 %		90,00 %		90,00 %	-	90,00 %	-	90,00 %	-	90,00 %			
		2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang mendapatkan distribusi alkon	89 faskes	89 faskes	165.951.000	89 faskes	165.951.000	89 faskes	135.017.750	89 faskes	130.868.950,00	89 faskes	130.868.950,00	89 faskes	95.443.150,00	89 faskes	95.443.150,00		Faskes
		2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah akseptor KB Baru MKJP yang terlayani	6500 akseptor	6500 akseptor	3.124.924.400	6750 akseptor	2.136.014.000	7000 akseptor	2.544.934.000	7250 akseptor	2.429.183.550	7500 akseptor	2.024.901.550,00	7500 akseptor	2.042.422.450,00	36000 akseptor	11.177.455.550,00		Fakses
		2.14.03.2.03.04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Layanan kasus komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP	12 bulan	12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	72.600.000	12 bulan	79.860.000,00	12 bulan	87.846.000,00	12 bulan	87.846.000,00	12 bulan	87.846.000,00		
		2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah sarana prasarana penunjang pelayanan KB	1 paket	1 paket	216.804.000	1 paket	216.000.000	1 paket	**169.973.250**	1 paket	**166.658.800,00**	1 paket	**166.658.800,00**	1 paket	**166.658.800,00**	1 paket	**166.658.800,00**		Kab Kediri

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN , PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**Jumlah kampung KB yang di bina**	**82 kampung KB**			**82 kampung KB**		**82 kampung KB**		**82 kampung KB**	**-**	**82 kampung KB**	**-**	**82 kampung KB**	**-**	**82 kampung KB**	**-**		
		2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang di bina	82 kampung KB	82 kkb	1.318.304.000	82 kampung KB	1.318.304.000	82 kampung KB	608.304.000	82 kampung KB	558.304.000	82 kampung KB	558.304.000	82 kampung KB	858.304.000	82 kampung KB	858.304.000		Kampung KB
		2.14.04	***PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)***	***Cakupan keluarga sasaran menjadi anggota kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL)***	**BKB 31,41%; BKR 26,6%; BKL 34,17%**			**BKB 31,93%; BKR 27,1%; BKL 34,87%**	**1.586.408.400**	**BKB 32,43%; BKR 27,68%; BKL 35,57%**	**966.729.250,00**	**BKB 32,98%; BKR 28,26%; BKL 36,32%**	**992.807.650,00**	**BKB 32,87%; BKR 28,84%; BKL 36,32%**	**1.064.570.500,00**	**BKB 32,87%; BKR 28,84%; BKL 36,32%**	**1.052.670.750,00**	**BKB 32,87%; BKR 28,84%; BKL 36,32%**	**3.119.038.850,00**		
		2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah kelompok sasaran pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	**6 sasaran**			6 sasaran		6 sasaran		6 sasaran		6 sasaran		6 sasaran		6 sasaran			
		2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah KKA/ BKB Kit / kit siap nikah yang diadakan	6030 lb	6030 lb / 8 unit	179.822.400	12000 lb/29 unit / 5 unit	649.142.000	10000 lb /10 unit / 10 unti	166.219.325	10000 lb /10 unit / 10 unti	164.672.000,00	10000 lb /10 unit / 10 unti	164.672.000,00	10000 lb /10 unit / 10 unti	164.672.000,00	10000 lb /10 unit / 10 unti	164.672.000,00		Kab Kediri

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN , PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.14.04.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketaha nan dan Kesejah teraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah pengelola kelompok Tri bina yang dilatih	50 orang	50 orang	7.518.100	48 orang	11.690.100	40 orang	9.097.000	40 orang	10.006.500	40 orang	11.007.250,00	40 orang	11.007.250,00	200 orang	52.808.100,00		Kab Kediri
		2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana /Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader kelompok tri bina yang dilatih	50 orang	50 orang	7.759.900	48 orang	12.170.900	40 orang	9.389.500	40 orang	10.328.500	40 orang	11.361.500,00	40 orang	11.361.500,00	200 orang	54.611.900,00		Kab Kediri
		2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah masyakat yang yang mendapat sosialisasi 1000 HPK	5250 orang	5250 orang	607.400.000	5250 orang	607.400.000	6500 orang	444.180.650	7750 orang	444.180.650	9000 orang	485.555.550,00	9000 orang	473.655.800,00	37500 orang	2.454.972.650,00		Kab Kediri
		2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pelaksanaan pameran harganas	1 event		79.987.000	1 event	80.000.000	1 event	112.994.925	1 event	124.294.400	1 event	136.723.600,00	1 event	136.723.600,00	1 event	136.723.600,00		Kab Kediri

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN , PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Desa stunting yang dibina	30 desa	30 desa	80.072.600	42 desa	75.416.400	52 desa	80.072.600	62 desa	80.072.600	72 desa	80.072.600,00	72 desa	80.072.600,00	72 desa	80.072.600,00		Kab Kediri
		2.14.04.2.02		***Persentase perkawinan perempuan usia < 20 tahun***	***16,87 %***		***16,8 %***	***16,75%***		***16,70%***	-	***16,65%***	-	***16,60%***	-	***16,60%***	-	***16,60%***	-		
		2.14.04.2.02.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Jumlah pembina dan kelompok PIK yang dibina**	**90 kelompok**			**90 kelompok**		**90 kelompok**	-	**90 kelompok**	-	**90 kelompok**	-	**90 kelompok**	-	**90 kelompok**	-		
		2.14.04.2.02.03	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kelompok PIK yang mendapatkan pembinaan	90 kelompok	90 klp	108.050.000	92 kelompok	135.339.000	95 kelompok	130.740.500	100 kelompok	143.814.500	105 kelompok	158.196.000,00	100 kelompok	158.196.000,00	100 kelompok	158.196.000,00		Kab Kediri

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN , PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN														Unit Kerja Perangkat daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		KONDISI AKHIR PERENCANAAN			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		2.14.02	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah pembina PIK yang mendapatkan pembinaan	100 orang	100 orang	11.599.000	100 orang	15.250.000	100 orang	14.034.750	100 orang	15.438.500	100 orang	16.982.000,00	100 orang	16.982.000,00	100 orang	16.982.000,00		Kab Kediri
JUMLAH							**17.302.216.062**		**18.151.712.442**		**17.153.969.800**		**17.341.656.350**		**17.529.527.550**		**17.699.951.450**		**29.542.964.150,**		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai DINAS P2KBP3A Kabupaten Kediri dalam 5 (lima) tahun mendatang adalah mendukung pencapaian Misi ke 1 (satu) RPJMD Kabupaten Kediri 2021-2026 yakni ***"Pengembangan Sumberdaya Manusia yang Berkarakter Nasionalis-Religius "*,** serta sasaran RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026, yaitu : ***Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga.***

Secara rinci, indikator kinerja DINAS P2KBP3A Kabupaten Kediri yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tersusun dalam Tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Dinas P2KBP3A	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian						Kondisi Kinerja pada Akir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase Keluarga Sejahtera		70,61%	71,11%	71,61%	72,11%	72,61%	73,11%	73,11%
2	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	93,07	93,13	93,19	93,25	93,31	93,37	93,43	93,43
3	Persentase OPD yang res ponsif gender	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase kasus kekera san terhadap perempuan yang tangani oleh P2TP2A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Peresentase Kegiatan Kese taraan Gender (KG) dan Hak Anak yang dilaksana kan di tingkat desa		80%	82%	85%	87%	89%	90%	90%

No	Indikator Kinerja Dinas P2KBP3A	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian						Kondisi Kinerja pada Akir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
6	Crude Birth Rate (CBR)	15,99	16,8	15,59	15,39	15,19	14,99	14,79	14,79
7	Prevalensi Peserta KB Aktif	60,74%	62,28%	63,83%	65,37%	66,91%	68,46%	70%	70%
8	Persentase desa/kelurahan yang memiliki data mikro keluarga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Cakupan keluarga sasar an menjadi ang gota kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL)	BKB 31,41%; BKR 26,6%; BKL 34,17%	BKB 31,41%; BKR 26,6%; BKL 34,17%	BKB 31,93%; BKR 27,1%; BKL 34,87%	BKB 32,43%; BKR 27,68%; BKL 35,57%	BKB 32,98%; BKR 28,26%; BKL 36,32%	BKB 32,87%; BKR 28,84%; BKL 36,32%	BKB 33,42%; BKR 29,42%; BKL 37,82%	BKB 33,42%; BKR 29,42%; BKL 37,82%
9	Persentase perkawinan perempuan usia < 20 tahun	16,87%	16,80%	16,75%	16,70%	16,65%	16,60%	16,50%	16,50%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis DINAS P2KBP3A Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur DINAS P2KBP3A Kabupaten Kediri dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan serta perencanaan pembangunan. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran DINAS P2KBP3A Kabupaten Kediri yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021 - 2026. Rencana Strategis ini juga merupakan pencerminan tuntutan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kediri yang ingin dicapai.

Rencana Strategis DINAS P2KBP3A Kabupaten Kediri ini diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja.

Kediri, - - 2021

Plt. Kepala DP2KBP3A
Kabupaten Kediri

dr. NURWULAN ANDADARI M.MRS.
Pembina
NIP. 19681029 200312 2 002